

**BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN ATAS
KEPATUHAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

Daftar Isi

II. Laporan Asurans Independen atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan Asurans Independen SPI

Lampiran B

Hasil Evaluasi Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern

- A. Kas dan Bank
- B. Piutang
- C. Persediaan
- D. Barang Milik Negara
- E. Pendapatan
- F. Biaya
- G. Pengadaan Barang dan Jasa

II

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Nomor: 17/25.IC.LMR

**Laporan Asurans Independen
Atas Kepatuhan Terhadap Sistem Pengendalian Internal**

**Kepada Yth. Dewan Pengawas dan Direktur
Politeknik Negeri Bandung
Jl. Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Kec. Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat**

Kami telah mengaudit Neraca **Politeknik Negeri Bandung** per tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan opini kami dengan Nomor 00017/2.1249/AU.5/11/1443-2/1/V/2025 pada tanggal 6 Mei 2025.

Informasi Hal Pokok

Manajemen **Politeknik Negeri Bandung** bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Standar Operasional Prosedur BLU, serta Peraturan-peraturan terkait operasional BLU.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang terkait dengan aspek operasional dan teknis terkait dengan kepatuhan terhadap pengendalian internal. Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi defisiensi pengendalian internal yang terjadi.

Tanggung Jawab Manajemen

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan, yang di dalamnya desain dan operasi dari satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif lebih rendah tentang terjadinya kekeliruan dan

Office:

Taman Pinang Indah Blok G7 No. 7
Lemahputro Sidoarjo 61213 Jawa Timur, Indonesia

✉ admin@kap-lmr.com ☎ +62 813-3338-7286 📷 kap_lmr 🌐 www.kap-lmr.com



ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan audit dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Basis adanya Defisiensi Pengendalian Internal

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya defisiensi pengendalian internal, sebagaimana kami lampirkan pada **Lampiran B**.

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk defisiensi pengendalian internal yang dijelaskan pada lampiran, **Politeknik Negeri Bandung** dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada **Politeknik Negeri Bandung** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP LUTHFI MUHAMMAD & REKAN



Ahmad Munajir, MA, Ak, CPA, Asean CPA

NRAP AP.1443

IAPI 4562

6 Mei 2025

Office:

Taman Pinang Indah Blok G7 No. 7
Lemahputro Sidoarjo 61213 Jawa Timur, Indonesia

✉ admin@kap-lmr.com ☎ +62 813-3338-7286 📷 kap_lmr 🌐 www.kap-lmr.com

LAMPIRAN B

a. Pengelolaan Kas dan Bank

Pengendalian intern kas bertujuan melindungi kas dan agar informasi mengenai kas lebih dapat dipercaya. Rancangan pengendalian intern penerimaan kas paling tidak adalah sebagai berikut:

- Petugas yang menangani urusan penerimaan kas tidak boleh merangkap sebagai pelaksana pembukuan/pencatatan atas penerimaan kas tersebut.
- Sebaliknya petugas yang bertanggungjawab pada pembukuan tidak boleh bertanggungjawab pada pengurusan kas.
- Setiap kali penerimaan kas harus segera dicatat, Bendahara harus mencatat formulir-formulir secara cermat sesuai dengan kebutuhan dan menggunakannya dengan benar.
- Penerimaan kas setiap hari harus disetorkan seluruhnya ke bank, hal ini dilakukan agar petugas yang menangani kas tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan kas lembaga untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **terdapat defisiensi/kelemahan atas pengendalian intern pada Pengelolaan Kas BLU Politeknik Negeri Bandung.**

Kondisi - Penerimaan Tidak Disetor Setiap Akhir Hari dan Penyetoran Poliklinik Secara Neto

1. Berdasarkan hasil kunjungan ke UPA Perpustakaan, terdapat penerimaan dari denda keterlambatan pengembalian buku bulan Desember 2024 yang baru disetorkan ke Rekening BLU Politeknik Negeri Bandung senilai Rp252.000 pada 23 Januari 2025; dan
2. Berdasarkan hasil kunjungan dan *walkthrough* ke Poliklinik, terdapat penerimaan atas layanan tanggal 16-31 Desember 2024 yang belum disetorkan ke rekening BLU Politeknik Negeri Bandung senilai Rp1.285.000. Dalam hal ini, Penerimaan dari Poliklinik yang disetorkan ke rekening BLU Politeknik Negeri Bandung secara Neto setelah dipotong jasa dokter.

Dampak

1. Tidak sesuai PMK Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 76 bahwa dalam hal penerimaan BLU diterima oleh fungsi kasir, fungsi kasir menyetorkan penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja saat penerimaan diterima ke rekening BLU.

2. Akibat penyetoran penerimaan secara neto, BLU mencatat penerimaan dan pendapatan sesuai nilai yang disetor ke rekening BLU saja atau terjadi kurang saji pada akun-akun tersebut serta Belanja yang tidak melalui mekanisme DIPA.

Saran

1. KPA menginstruksikan bagian UPA Perpustakaan dan Poliklinik untuk melakukan penyetoran sesuai PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Pasal 76, yaitu setiap akhir hari kerja.
2. KPA menginstruksikan bagian terkait untuk melakukan penyetoran secara bruto yaitu, dengan tidak menggunakan pendapatan secara langsung untuk operasional unit.

Tanggapan Manajemen

KPA telah menginstruksikan kepada Ka. UPA Perpustakaan dan Ka. Poliklinik dengan nomor surat 588/PL1/KU.00.00/2024 tanggal 28 April 2025 perihal Instruksi terkait penyetoran pendapatan Poliklinik dan Perpustakaan serta penyetoran secara bruto dengan tidak menggunakan pendapatan secara langsung untuk operasional unit sesuai PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Pasal 76.

b. Pengelolaan Piutang

Pengendalian intern piutang bertujuan melindungi piutang dan agar informasi mengenai piutang lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern piutang paling tidak adalah sebagai berikut:

- Meyakini kebenaran jumlah piutang yang ada yang benar-benar menjadi hak milik Badan Layanan Umum
- Meyakini bahwa piutang yang ada dapat ditagih (collectible)
- Ditaatinya kebijakan-kebijakan mengenai piutang, dan piutang aman dari penyelewengan.

Output dari sistem pengendalian intern piutang adalah berupa informasi dalam bentuk laporan keuangan atau laporan manajemen lain, sehingga karakteristik sistem pengendalian intern piutang identik dengan karakteristik informasi.

Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan defisiensi/kelemahan** atas pengendalian internal pada **Pengelolaan Akun Piutang Usaha** BLU Politeknik Negeri Bandung.

c. Persediaan

Pengendalian internal persediaan bertujuan melindungi persediaan dan agar informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern persediaan dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, kelalaian di dalam menyimpan barang persediaan maupun tindakan menyimpang lainnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem dan prosedur yang mampu membuat suatu kegiatan ataupun transaksi dapat terkendali sehingga kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan persediaan dapat diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, ditemukan **defisiensi/kelemahan** atas **pengendalian internal** dalam **Pengelolaan Persediaan** BLU Politeknik Negeri Bandung.

Temuan 1 - SOP Persediaan Tidak Mengakomodir Mekanisme Penghapusan Persediaan Usang ataupun Rusak

Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan KAP, terdapat persediaan di Poliklinik yang usang tetapi belum dimusnahkan karena BLU Politeknik Negeri Bandung tidak memiliki SOP ataupun mekanisme terkait penghapusan persediaan usang medis maupun non-medis.

Dampak

Tidak adanya SOP yang mendetail terkait pengelolaan persediaan menunjukkan lemahnya pengendalian internal yang terjadi pada Politeknik Negeri Bandung. Hal ini dapat menyebabkan potensi kerugian karena kehilangan atau bahkan *fraud* yang dilakukan oleh oknum. Jika hal ini terus berlangsung, akun persediaan menjadi akun yang rentan penyimpangan dan kurang terkontrol serta berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Negara.

Saran

Kami menyarankan pada Pimpinan BLU dan Manajemen BLU agar membuat SOP persediaan untuk barang medis maupun non medis sehingga diharapkan kedepannya persediaan di setiap unit BLU Politeknik Negeri Bandung memiliki mekanisme kontrol persediaan yang baik.

Tanggapan Manajemen

SOP persediaan Politeknik Negeri Bandung untuk barang medis maupun non medis telah disusun dengan nomor POS PL1/OT.01.00/POS/LK.09.A.01.

Temuan 2 - Penatausahaan dan Pengelolaan di Unit/Jurusan Tidak Optimal

Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan dan dokumen pendukung, ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal terkait pencatatan dan pengelolaan persediaan di jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Konversi Energi, dan Teknik Elektro dengan uraian sebagai berikut.

a. Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Konversi Energi, dan Teknik Elektro

- Operator persediaan unit tidak melakukan pencatatan secara *real time* terkait dengan pemakaian barang persediaan;
- Tidak dilakukan pemisahan antara barang yang sudah terpakai dan stok; dan
- Pencatatan pemakaian pada kartu kontrol persediaan tidak disesuaikan dengan satuan yang terekam pada aplikasi SAKTI.

b. Teknik Kimia

- Terdapat beberapa jenis persediaan yang sama namun diinput dengan kode barang yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Kode Barang
1	Klorida p.a 250gr	100348 Besi (II)	100055 Besi (II)
2	Natrium Hidroksida	100279 - 1 Kemasan 1 Kg	100161 - 1 Kemasan 1000 gram
3	Alkohol	100006 - Alkohol 50 liter	100118 Ethanol 96%

Dampak

1. Tidak dilaksanakannya pencatatan secara *real time* oleh operator persediaan unit atas pemakaian barang persediaan dapat berdampak pada ketidaktepatan data stok, kesulitan dalam perencanaan kebutuhan, serta meningkatnya risiko kehilangan atau penyalahgunaan barang. Selain itu, hal ini dapat menghambat proses pelaporan, menurunkan akuntabilitas pengelolaan, serta berpotensi mengganggu kelancaran operasional unit secara keseluruhan.
2. Tidak dilakukannya pemisahan antara barang yang sudah terpakai dan stok dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pencatatan persediaan, menyulitkan proses identifikasi kondisi barang, serta meningkatkan risiko kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan.

3. Ketidaksesuaian satuan antara kartu kontrol persediaan dan aplikasi SAKTI dapat menyebabkan perbedaan data, kesalahan pelaporan, dan kesulitan rekonsiliasi.
4. Penggunaan kode barang berbeda untuk jenis persediaan yang sama dapat menyebabkan dapat menyulitkan pemantauan stok serta mengganggu akurasi pelaporan dan pengendalian persediaan.

Saran

1. KPA menginstruksikan operator persediaan unit untuk mencatat pemakaian barang persediaan secara langsung (*real time*) pada sistem dan kartu kontrol untuk memastikan kesesuaian data antara stok fisik dan yang tercatat dalam system.
2. BLU Politeknik Negeri Bandung dapat memberikan label atau kategori khusus pada barang yang sudah digunakan apabila barang tersebut penyimpanannya masih dalam ruangan yang sama agar dapat tercatat dengan benar antara stok dengan barang yang sudah terpakai.
3. PPK Belanja Barang, Operator Persediaan Pusat, dan Unit perlu melakukan penyesuaian antara satuan maupun penamaan kode barang yang tercatat dalam kartu kontrol persediaan dan aplikasi SAKTI dan memastikan pencatatan pemakaian barang harus konsisten dalam hal satuan untuk mencegah ketidaksesuaian data antara satu dengan lainnya.

Tanggapan Manajemen

1. *KPA menginstruksikan operator persediaan unit untuk mencatat pemakaian barang persediaan secara langsung (real time) pada sistem dan kartu kontrol untuk memastikan kesesuaian data antara stok fisik dan yang tercatat dalam sistem.*
2. *BLU Politeknik Negeri Bandung dapat memberikan label atau kategori khusus pada barang yang sudah digunakan apabila barang tersebut penyimpanannya masih dalam ruangan yang sama agar dapat tercatat dengan benar antara stok dengan barang yang sudah terpakai.*
3. *PPK Belanja Barang, Operator Persediaan Pusat, dan Unit perlu melakukan penyesuaian antara satuan maupun penamaan kode barang yang tercatat dalam kartu kontrol persediaan dan aplikasi SAKTI dan memastikan pencatatan pemakaian barang harus konsisten dalam hal satuan untuk mencegah ketidaksesuaian data antara satu dengan lainnya.*

d. Barang Milik Negara

Pengendalian intern Barang Milik Negara bertujuan melindungi Barang Milik Negara dan agar informasi mengenai Barang Milik Negara lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, kelalaian di dalam pengelolaan Barang Milik Negara maupun tindakan menyimpang lainnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem dan prosedur yang mampu membuat suatu kegiatan ataupun transaksi dapat terkendali sehingga kesalahan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pengelolaan aset tetap dapat diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **ditemukan defisiensi/kelemahan atas pengendalian internal dalam Pengelolaan Barang Milik Negara pada BLU Politeknik Negeri Bandung.**

Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas tindak lanjut temuan KAP tahun 2023, Aset Hibah berupa 1 buah Schneider Pix 12 nomor BAST B/5364/PL1/KS.00.00/20 tanggal perolehan 5 Desember 2023 seharga Rp360.000.000 yang belum digunakan sampai dengan akhir periode pelaporan 2024. Berdasarkan keterangan dari pihak jurusan, aset tersebut belum dapat dioperasikan karena belum tersedia tenaga teknisi yang memiliki keahlian dalam pengoperasian mesin tersebut.

Dampak

Aset berisiko tidak memberikan manfaat optimal dan mengalami penurunan kondisi fisik akibat tidak digunakan dalam jangka waktu lama, serta menyebabkan biaya penyusutan atas aset tetap yang lebih tinggi karena barang yang belum siap digunakan telah masuk dalam modul aset tetap sehingga perhitungan penyusutan tetap berjalan meskipun aset belum digunakan.

Saran

1. KPA menginstruksikan pihak BMN pusat dan jurusan agar segera menyusun rencana pemanfaatan aset hibah tersebut, termasuk penyiapan sarana pendukung seperti ruangan dan SDM teknis.
2. Jika dalam jangka waktu tertentu tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan, maka perlu dilakukan evaluasi kelayakan untuk redistribusi aset ke unit lain yang lebih membutuhkan dan mampu mengoperasikannya. BLU Politeknik Negeri Bandung perlu

menetapkan SOP atau mekanisme evaluasi kelayakan atas barang hibah yang akan diterima, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga teknis serta relevansi dan kebutuhan barang tersebut terhadap kegiatan pendidikan maupun operasional BLU.

Tanggapan Manajemen

Telah dilakukan pengecekan dan klarifikasi ulang terkait penggunaan aset hibah berupa 1 buah Schneider Pix 12 nomor BAST B/5364/PL1/KS.00.00/20 tanggal perolehan 5 Desember 2023 seharga Rp360.000.000 bahwa aset tersebut sudah mulai digunakan pada tahap pengenalan kepada mahasiswa untuk selanjutnya akan digunakan sesuai fungsi dan peruntukannya.

e. Pendapatan

Pengendalian intern pendapatan bertujuan melindungi pendapatan dan agar informasi mengenai pendapatan lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern pendapatan berkaitan erat dengan pengendalian intern kas dan piutang. Pengendalian intern pendapatan paling tidak adalah sebagai berikut: meyakini kebenaran jumlah pendapatan yang ada yang benar-benar menjadi hak milik entitas, ditaatinya kebijakan-kebijakan mengenai pendapatan, dan pendapatan aman dari penyelewengan. Output dari sistem pengendalian intern pendapatan adalah berupa informasi dalam bentuk laporan keuangan atau laporan manajemen lain, sehingga karakteristik sistem pengendalian intern pendapatan identik dengan karakteristik informasi.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **ditemukan defisiensi/kelemahan atas pengendalian intern dalam Pengelolaan Pendapatan** pada BLU Politeknik Negeri Bandung.

Kondisi

Pada Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 *Unaudited* tercatat saldo terkait akun Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Dana Pihak Ketiga BLU yang terinci sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun	Saldo
424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	86.917.967.245
212193	Dana Pihak Ketiga BLU	1.120.717.828

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat pengembalian UKT Mahasiswa penerima beasiswa Star Academy 2025 Tahun Ajaran 2024 sebesar yang belum diakui sebagai Dana Pihak Ketiga BLU sebesar Rp66.500.000 pada laporan keuangan 31 Desember 2024 *Unaudited*.

Dampak

Berdasarkan kondisi di atas, terdapat kurang saji atas akun Dana Pihak Ketiga BLU dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan atas pengembalian UKT di Tahun 2025 atas Tahun Ajaran 2024.

Saran

Kami mengajukan usulan Jurnal Koreksi Sebagai Berikut.

Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	66.500.000	
212193	Dana Pihak Ketiga BLU		66.500.000
	<i>(Koreksi kurang saji akun dana pihak ketiga lainnya - BLU)</i>		

Tanggapan Manajemen

Sudah dilakukan Jurnal Koreksi sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2024.

Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	66.500.000	
212193	Dana Pihak Ketiga BLU		66.500.000
	<i>(Koreksi kurang saji akun dana pihak ketiga lainnya - BLU)</i>		

f. Biaya

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. Biaya diklasifikasikan dalam beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban pemeliharaan, beban langganan daya, beban perjalanan dinas, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi. Biaya diakui pada

saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan kelemahan atas pengendalian intern dalam Pengelolaan Biaya BLU Politeknik Negeri Bandung.**

g. Pengadaan Barang & Jasa

Sesuai dengan peraturan yang terkait pengadaan barang dan jasa, bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa maupun Swakelola terdiri atas: KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Berkenaan dengan aspek perencanaan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Negeri Bandung diwajibkan menginput secara lengkap data paket pengadaan baik dari penyedia maupun swakelola melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **ditemukan defisiensi pengendalian internal** dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Kondisi

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat pengadaan barang dan jasa BLU Politeknik Negeri Bandung yang tidak ditemukan pada aplikasi SiRUP dan terdapat pengadaan yang nilai realisasinya melebihi pagu yang ditetapkan, dengan rincian berikut ini:

Realisasi Pengadaan Barang & Jasa diatas Nilai Pagu					
No.	Nama Paket	RUP	Nilai Kontrak	Nilai Pagu	Selisih
1	Pengadaan Bahan Kontes Robot Sar Indonesia (Krsri)	45212763	49.677.606	49.550.000	127.606
2	Pengadaan Toga Mahasiswa	45212718	282.577.500	225.948.000	56.629.500
3	Pengadaan Jas Laboratorium Praktikum Jurusan Teknik Kimia	45212725	76.417.500	69.264.000	7.153.500

Realisasi Pengadaan Barang & Jasa diatas Nilai Pagu					
No.	Nama Paket	RUP	Nilai Kontrak	Nilai Pagu	Selisih
4	Pengadaan Sewa Elektronik Perlengkapan Kegiatan Pelantikan Mahasiswa Baru	45212740	114.101.340	45.000.000	69.101.340
5	Pengadaan Peralatan Laboratorium Jurusan Teknik Mesin	51966430	141.385.473	75.877.000	65.508.473
6	Pengadaan Alat Pendidikan Jurusan Teknik Kimia Paket 3	52698327	167.632.200	145.686.000	21.946.200
			831.791.619	611.325.000	220.466.619
Daftar Pengadaan di RUP Tidak Tercatat pada SiRUP					
No.	Nama Paket	RUP	Nilai Kontrak	Nilai Pagu	Selisih
1	Pengadaan Jam Dinding	-	8.114.100	-	8.114.100
2	Pengadaan Ac Ruang Podcast	-	8.839.209	-	8.839.209
3	Fullboard Residential Twin	-	14.500.000	-	14.500.000
			43.940.809	-	43.940.809

Dampak

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan di atas, mencerminkan bahwa BLU Politeknik Negeri Bandung belum mematuhi UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan dan Informasi Publik diantaranya Kewajiban mengumumkan RUP. PA/KPA mengumumkan RUP agar para penyedia barang ataupun jasa mempunyai waktu bersiap untuk mengikuti proses lelang sekaligus bukti bahwa Kementerian tersebut telah melakukan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang ataupun jasa yakni terbuka dan transparan. Selain itu, terdapat paket pengadaan yang realisasinya melebihi pagu dengan nilai selisih lebih sebesar Rp 264.407.428 atas pagu yang berada di SIRUP.

Saran

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran perlu secara rutin melakukan koordinasi internal dengan Unit Layanan Pengadaan atas aktivitas program dan anggaran serta pengisian SIRUP secara lengkap dan tepat waktu dan kami menyarankan kepada

Pimpinan BLU Politeknik Negeri Bandung untuk berkoordinasi dengan bagian Perencanaan serta Pengadaan atas perubahan pagu pada BLU agar dilakukan penyesuaian pada aplikasi SiRUP supaya tidak lagi selisih antara SiRUP dan pagu yang sebenarnya.

Tanggapan Manajemen

Pengumuman RUP pada SIRUP biasanya dilakukan di awal tahun. RUP dibuat berdasarkan identifikasi dari RKAKL yang berlaku saat itu. Adapun kondisi anggaran dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa sifatnya dinamis. Nilai-nilai PAGU pada RKAKL dapat berubah karena proses revisi anggaran. Dan beberapa pengadaan tidak masuk pengumuman di SIRUP adalah hal memang memungkinkan terjadi. Pertama karena karakteristik RKAKL Polban, akun anggaran biasanya berdasarkan unit/jurusan/kegiatan yang di dalamnya berisi banyak item yang berbeda-beda katagorinya sehingga yang tadinya teridentifikasi 1 paket bisa menjadi beberapa paket. Bisa juga muncul paket pengadaan yang tidak bisa teridentifikasi saat diumumkan di SIRUP walau alokasi anggarannya sudah ada dari awal tahun. Bisa juga muncul paket baru akibat adanya alokasi dana yg masuk, misal karena ada hibah, top up pagu, dll. Bisa juga muncul paket baru karena optimalisasi sisa anggaran yang tidak terserap.

Untuk pengadaan yang nilai kontrak di atas PAGU, maka sebenarnya pengadaan tidak melebihi PAGU yang tersedia.

No.	Nama Paket	Kode MAK	PAGU	Nilai Kontrak
1	Pengadaan Bahan Kontes Robot Sar Indonesia (Krsri)	4467.DBA.001.084.B.525112	89.550.000	49.550.000
2	Pengadaan Toga Mahasiswa	4467.DBA.001.056.A.525121	285.000.000	225.948.000
3	Pengadaan Sewa Elektronik Perlengkapan Kegiatan Pelantikan Mahasiswa Baru	4467.DBA.001.052.D.525113	155.050.000	
4	Pengadaan Peralatan Laboratorium Jurusan Teknik Mesin	4467.CAA.001.052.E.537112	570.815.000	
5	Pengadaan Alat Pendidikan Jurusan Teknik Kimia Paket 3	4467.CAA.001.052.B.537112	691.003.000	

Untuk paket pengadaan Jas Laboratorium Praktikum Teknik Kimia maka pagu item dibawah nilai kontrak akan tetapi karena masih satu katagori dengan pengadaan Jas Laboratrium dan WearPack maka Total PAGU masih di atas kontrak gabungan 2 paket tersebut.

No.	Nama Paket	Kode MAK	PAGU	Nilai Kontrak	Ket
1	Pengadaan Jas Laboratorium Praktikum Jurusan Teknik Kimia	4467.DBA.001.052.A. 525121	69.264.000	76.417.500	PAGU gabungan sebesar 547.389.000
2	Pengadaan Jas Laboratorium Praktikum dan Wearpack Mahasiswa		478.125.000	464.725.000	Nilai kontrak gabungan 541.142.500

Untuk pengadaan di RUP yang tidak tercatat pada SIRUP:

- 1. Pengadaan Jam dinding dan pengadan AC Podcast dilakukan dengan pembelian langsung tidak memerlukan kode RUP, dan merupakan pengadaan yang tidak terencana pada SIRUP dikarenakan kebutuhan yang mendadak muncul atau karena proses optimalisasi dari sisa anggaran yang tidak terserap karena efisiensi proses pengadaan.*
- 2. Untuk Paket Fullboard Residential Twin termasuk pengadaan yang dikecualikan, tidak memerlukan HPS dan tidak perlu kode RUP. Paket ini belum dapat diidentifikasi di awal tahun dan tidak terumumkan pada SIRUP.*